

**KABUPATEN  
KEPUAUAN  
SELAYAR**



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
TAHUN 2025**

Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan kinerja ini memuat informasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengelola manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang menunjang Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar yakni , yang mengacu pada Rencana Strategis 2025-2030 BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar.

Informasi kinerja yang disajikan mengenai sumber daya organisasi yang tersedia, Perencanaan kinerja, target yang telah ditetapkan dan capaian kinerja organisasi, realisasi keuangan, tantangan yang dihadapi dan upaya mengatasi tantangan tersebut, analisis capaian kinerja organisasi, dokumentasi kegiatan OPD dan sejumlah prestasi yang telah di raih BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar.

Komitmen pimpinan dan kerjasama pegawai yang dinamis dan sinergis menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian kinerja yang berdampak dan berorientasi hasil, pengelolaan kompetensi pegawai yang baik juga berperan penting untuk melahirkan berbagai inovasi yang menunjang kinerja organisasi, selain itu dibutuhkan konsistensi untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja organisasi di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkelanjutan.

Semoga LAKIP ini bermanfaat terutama bagi peningkatan kinerja seluruh pegawai Badan Kepegaaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di masa mendatang.

Benteng Selayar, Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



**ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE., M.M**

Pangkat : Pembina

NIP. 19780520 200604 2036

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Day Manusia.....	3
B. Isu-Isu Strategis.....	9
C. Keadaan Pegawai .....	12
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b> .....	17
A. Rencana Strategis.....	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	20
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	22
B. Realisasi Anggaran .....	62
<b>BAB V Penutup</b> .....	82



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Stuktur Organisasi BKPSDM.....	4
TABEL 1.1	Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	10
TABEL 1.2	Jumlah ASN BKPSDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
TABEL 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan .....	13
TABEL 1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan .....	13
TABEL 1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Beban Kerja .....	14
TABEL 1.6	Tabel keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM .....	15
TABEL 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	18
TABEL 2.2	Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	21
TABEL 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
TABEL 3.2	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025 .....	24
TABEL 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	33
TABEL 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	45
TABEL 3.5	Sumber Daya Aparatur BKPSDM T.A 2025 .....	57
TABEL 3.6	Penggolongan ASN T.A 2025 .....	58
TABEL 3.7	Penggolongan ASN dari Tingkat Pendidikan T.A 2025 .....	58
TABEL 3.8	Penggolongan ASN PPPK PW.....	59
TABEL 3.9	Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....	61
TABEL 3.10	Analisis Akuntabilitas Keuangan BKPSDM Tahun Anggaran 2025	62

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan dan penilaian kinerja pemerintah daerah menganut prinsip-prinsip *good governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan kepemimpinan yang efektif

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam konsep *nawacita* yang menjadi arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Selanjutnya BKPSDM menyusun Rencana Strategis 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD 2021-2026 sebagai pedoman dalam memberikan arah kebijakan organisasi untuk mengelola pelaksanaan sasaran program, indikator kinerja, target kinerja untuk mengukur keberhasilan organisasi secara berjenjang setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* khususnya transparansi dan Kolaboratif.

Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 diharapkan mampu:

1. Memberikan informasi hasil capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025
2. Mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan tugas pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance* untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menjalankan regulasi dan kebijakan dalam upaya praktek terbaik dan benar yang transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan dan umpan balik bagi yang berkepentingan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan untuk

meningkatkan kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.

4. Menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar di bidang Manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **A. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBNER DAYA MANUSIA.**

### **1. Struktur Organisasi**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, memiliki struktur organisasi seperti pada gambar berikut :

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Badan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum;
  2. Sub Bagian Program;

3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

## Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

### 2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKPSDM;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **1) Kepala Badan**

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretaris**

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;

- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-undangan.

❖ **Kepala Subbagian Program**

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

❖ **Kepala Subbagian Keuangan**

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

**3) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

**4) Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan**

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

**6) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**B. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi atau perangkat aturan serta adanya perkembangan dan terjadinya perubahan lingkungan strategis selama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir, maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, ada beberapa permasalahan dan isu-isu yang sangat mendasar untuk dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang yaitu:

- a. Masih rendahnya kinerja ASN;
- b. Kebutuhan diklat teknis dan fungsional setiap tahun dari OPD belum dapat dipenuhi;
- c. Program “Diklat Satu Pintu” belum dilaksanakan;
- d. Kebutuhan diklat penjenjangan setiap tahun dari OPD belum dapat dipenuhi;
- e. Standar kompetensi jabatan manajerial dan fungsional belum diterapkan.

**Tabel 1.1**  
**Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih rendahnya kinerja ASN	1. Integritas ASN masih rendah; 2. Kinerja ASN yang rendah dan belum	1. Belum terwujudnya pelayanan yang cepat dan berkualitas serta terjadinya praktik

		terukur	penyalahgunaan kewenangan; 2. Kinerja pegawai belum dirumuskan secara memadai dan belum terintegrasi dengan indikator kinerja organisasi
2.	Kebutuhan diklat teknis dan fungsional setiap tahun dari OPD belum dapat dipenuhi	1. Dokumen Analisis perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional (APKP) dari OPD belum disusun	2. Masih kurangnya analisis diklat yang ditempatkan pada OPD
3.	Program "DIKLAT SATU PINTU" belum dilaksanakan	3. Program yang direncanakan tidak optimal karena kurangnya dukungan dan koordinasi OPD	3. OPD masih mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bimtek tanpa koordinasi dengan BKPSDM.
4.	Kebutuhan diklat penjenjangan setiap tahun dari OPD belum dapat dipenuhi	4. Dokumen Analisis perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dari OPD belum disusun	4. Masih kurangnya analisis diklat yang ditempatkan pada OPD

5.	Standar kompetensi jabatan manajerial dan fungsional belum diterapkan	5. Adanya kebijakan nasional yang berubah-ubah sehingga kebijakan internal daerah tidak optimal	5. Adanya perubahan kelembagaan sehingga standar kompetensi jabatan manajerial dan fungsional harus disusun kembali/diulang
----	---	---	---

### C. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 sebanyak 66 orang yang terdiri 39 Orang PNS, 5 Orang PPPK dan 22 Orang Kontrak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah ASN BKPSDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PNS			PPPK			Pegawai Kontrak			Jumlah Pegawai
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Pria	Wanita		Pria	Wanita		Pria	Wanita		
1	SD	-	-								
2	SLTP	-	-								
3	SLTA	4	3	7	1	1	2	4	5	9	18
4	D1										
5	D3	1	1	2					1	1	3
6	D4										
7	S1	11	11	22		3	3	2	10	12	37
8	S2	2	6	8							8
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>66</b>

### 1.3. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Golongan IV	4	2	6
2.	Golongan III	10	18	28
3.	Golongan II	4	1	5
4.	Golongan I	0	0	0
5.	PPPK (Gol IX)	-	3	3
6.	PPPK (Gol V)	1	1	2
7.	PPPK PW	6	16	22
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>

Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Kepala Badan	-	1	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	1	2	3
4.	Kepala Sub Koordinator	-	3	3
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	17	26	43
6.	Pelaksana	6	9	15
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>

**Tabel 1.5 Jumlah ASN Berdasarkan Beban Kerja**

No.	Bidang	Kebutuhan Pegawai Sesuai Beban Kerja	Bezetting	Selisih
1	Kepala Badan	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kasubang Program	1	1	0
4	Kesubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1	1	0
5	Kasubang Keuangan	1	1	0
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0
7	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	1	1	0
8	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	1	0
9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	5	3	2
10	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	7	5	2
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	7	5	2
12	Penelaah Teknis Kebijakan	15	10	5
13	Pengolah Data dan Informasi	7	2	5
14	Pengadministrasi Perkantoran	11	7	4
15	Pranata Komputer Penyelia	2	0	2
16	Pranata Komputer Mahir	4	0	0
17	Pranata Komputer Terampil	4	2	2
18	Pranata Komputer Ahli Madya	4	0	4
19	Pranata Komputer Ahli	4	0	4

	Muda			
20	Pranata Kompueter Ahli Pertama	6	3	3
21	Penata Layanan Operasional	12	0	12
22	Operator layanan Operasional	6	2	4

**Tabel 1.6 Tabel keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	Alat Angkutan:				
	a. Roda 4	2 unit	Baik	5 unit	
	b. Roda 2	26 unit	Baik	30 unit	
2	Alat-alat kantor dan rumah tangga:				
	1) Mesin ketik	2 unit	2 Rusak Berat	3 unit	
	2) Rak kayu	3 unit	Baik	6 unit	
	3) Rak besi	1 unit	Baik	6 unit	
	4) Filling cabinet	5 unit	Baik	22 unit	
	5) Monitor	1 unit	Baik	1 unit	
	6) Almari besi dan kaca	10 unit	Baik	24 unit	
	7) Almari kayu	3 unit	Baik	11 unit	
	8) LCD Monitor (TV)	2 unit	Baik	10 unit	
	9) Kursi tamu	16 unit	Baik	23 unit	
	10) Meja rapat	20 unit	13 Rusak	30 unit	
	11) Kursi putar	11 unit	Baik	24 unit	
12) Kursi	82 unit	3 Rusak	100 unit		

	biasa		Berat		
	13) Almaries	2 unit	Baik	3 unit	
	14) AC	23 unit	Baik	15 unit	
	15) Kipas angin	4 unit	Baik	4 unit	
	16) Wireless	3 unit	2 Rusak	1 unit	
	17) Komputer PC	15 unit	Baik	26 unit	
	18) Laptop	37 unit	Baik	45 unit	
	19) Notebook	22 unit	Baik	30 unit	
	20) Printer	34 unit	Baik	40 unit	
	21) LCD	4 unit	Baik	8 unit	
	22) Kamera	1 unit	Baik	3 unit	
	23) Mesin faximile	2 unit	Rusak Berat	1 unit	
	24) Buku pustaka	7 Judul	Baik	10 judul	
	25) Handy talky	5 unit	Baik	5 unit	
	26) Meja setengah biro	10 unit	Baik	35 unit	
<b>3</b>	Gedung dan Bangunan:				
	1) Gedung BKPSDM	1 unit	Baik	1 unit	

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten kepulauan Selayar, sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

#### **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (dua) bagian pokok visi yakni “Bandar Maritim” dan “Kawasan Timur Indonesia”. “Bandar Maritim” adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri. “Kawasan Timur Indonesia” menunjukkan arti bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industry dan distribusi logistic yang mencakup Kabupaten/Kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

- 1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;**
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2021 – 2026), maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Profesionalitas ASN	1.1. Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Pegawai 1.2. Meningkatnya Kompetensi dan Keahlian pegawai disemua jenjang jabatan	1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Aparatur	1. Penguatan kerjasama pengembangan SDM dengan Perguruan Tinggi. Lembaga Penyelenggara Pengembangan SDM dan Instansi Pembina 2. Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur Terintegrasi (CORPORATE UNIVERSITY)
2. Mewujudkan Reformasi	1. Meningkatnya Kepercayaan	1. meningkatkan perencanaan	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas

Birokrasi Perangkat Daerah	Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat daerah	yang berorientasi hasil. 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Meningkatkan kapasitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditjang perangkat teknologi informasi yang baik	sumber daya aparatur 2. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
----------------------------------	--	---	---

Dengan memperhatikan Visi Daerah serta dengan memperhatikan perubahan Paradigma Pemerintahan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah gambaran kondisi objektif yang ingin dicapai dimasa kini dan masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategik dengan indikator yang jelas dan mempunyai tolak ukur (*Benchmark*) serta tugas yang fleksibel (*Moving Target*). Berdasarkan pengertian ini maka Visi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar  
yaitu : *"TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG AMANAH,  
PROFESIONAL DAN SEJAHTERA"*.

Dan untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan karir pegawai negeri sipil sesuai kompetensinya;
2. Menciptakan sumber daya aparatur yang berkualitas, inovatif, dan kreatif;
3. Peningkatan kesejahteraan dan menerapkan reward and punishment;
4. Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai nilai spiritual dalam pelaksanaan tugas-tugas.

#### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen fakta kinerja yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang dibawahnya untuk melaksanakan program, kegiatan yang disertai indikator kinerja. Dokumen ini menarasikan kesepakatan komitmen penerima amanah dan pemberi amanah untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai tugas, fungsi dan wewenang serta anggaran yang tersedia.

Tujuan perjanjian kinerja antara lain sebagai upaya mewujudkan komitmen secara berjenjang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; sebagai tolok ukur kinerja pegawai, monitoring, evaluasi kinerja pegawai dan supervisi. Dokumen perjanjian kinerja didalamnya memuat jenjang tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga sub kegiatan. Dokumen perjanjian kinerja juga sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2025 tidak mengalami perubahan target kinerja sasaran sedangkan penganggarannya menyesuaikan APBD Tahun 2025.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kunci  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Displin	Persentase peningkatan kinerja pegawai	90 %
		Persentase peningkatan disiplin pegawai	92 %
	Meningkatnya kompetensi dan keahlian pegawai disemua jengjang jabatan	Persentase peningkatan pegawai dalam pengembangan kompetensi dan keahlian	66 %
2	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	BB
		Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Sesuai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82 %

Secara lebih rinci maka Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sesuai dengan tingkat jabatan dan tanggungjawab dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025**

Kinerja BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan proses dan hasil kerja berdampak yang berhubungan pencapaian tujuan strategis, tingkat kepuasan pengguna layanan kepegawaian dan kontribusi organisasi perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sedangkan capaian kinerja organisasi BKPSDM menjadi bagian dari pengukuran kinerja yang berupaya mendeskripsikan kemajuan capaian kinerja perangkat daerah sesuai dengan rencana strategis, rencana kerja dana anggaran serta perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran tersebut menggambarkan posisi BKPSDM dalam skala nilai peringkat kinerja berdasarkan interval nilai realisasi kinerja yang menentukan tingkatan kategori kinerja instansi pemerintah yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

(Sumber:Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun ini (Tahun 2025) dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja. Data digambarkan sesuai dengan rincian pada tabel 3.2 yang membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tolak ukur capaian kinerja sasaran yaitu meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan Merbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 ditunjukkan pada tabel 3.3.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Tahun Anggaran 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	WAKTU PELAKSANAAN				REALISASI	CAPAIAN
											I	II	III	IV		
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkannya Kepercayaan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah	Nilai Sikip Perangkat Daerah	BB	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	11.896.018	3 dokumen	√	√			96,43 %
							Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.387.670	1 dokumen	√	√			91,92 %
							Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.348.235	1 dokumen	√	√			90,42 %
							Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1.710.113	1 dokumen	√	√			91,89 %





Administrasi Umum perangkat daerah	Administrasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 paket	6.005.898	√	√	√	√	1 paket	96,27 %
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	91.440.899	√	√	√	√	5 paket	98,81 %
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	8.219.404	√	√	√	√	3 paket	88,05 %
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 dokumen	2.380.00	√				5 dokumen	100 %
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	224.228.000	√	√	√	√	153.783.740	99,99 %
		Penatausahaan arsp dinamis	Jumlah Dokumen	1 dokumen	5.340.600	√	√	√	√	1 dokumen	87,87 %









Program pengembangan sumber daya manusia	Pengembangan Kompetensi teknis	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Fungsional Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi /	105 orang	176.904.566	✓	✓	✓	✓	105 orang	93,93 %
	Sertifikasi, kelengkapan pengembangan kompetensi material dan fungsional	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 laporan	133.687.643	✓	✓	✓	✓	5 laporan	95,51 %

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Badan Tahun 2024 dan Tahun 2025**  
**Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
									REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkannya Kepercayaan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100 %	3 dokumen	96,43 %
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dokumen	100 %	1 dokumen	91,92 %



					Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	100 %	1 laporan		1 laporan	96,43 %
				Evaluasi kinerja perangkat daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45 Orang/Bulan	94,58 %
			Sesuai	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Administrasi keuangan perangkat daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	43 Orang/Bulan		12 Dokumen	97,26 %
	Laporan keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	12 Dokumen		12 Dokumen	91,45 %
									Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				12 dokumen	



Administrasi Umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100%	1 paket	96,27%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	100%	5 paket	98,81%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100 %	3 paket	88,05 %
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundangan yang disediakan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	4 Dokumen	100%	5 dokumen	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	100 %	12 laporan	99,99 %



	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Laporan	100%	2 Laporan	99,43%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	1 Laporan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	100%	27 unit	96,79 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir	-	-	1 Unit	100%

Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPK	habilitasi	6 Dokumen	100%	5 Dokumen	96,85 %
	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	90,52%
	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	100 %	1 lembaga	98,63%
	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	98,77 %

2	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kinerja Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai	90%	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa Aparatur	Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	100 %	1 laporan	91,58 %
			Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai	92%	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Pembinaan disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	37 Orang	100 %	38 Orang	91,57%
			Persentase Peningkatan pegawai dalam pengembangan kompetensi dan keahlian	66%	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	96,70%



Program kepegawaian daerah	Pengembangan kompetensi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 orang	100 %	10 orang	99,84%
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	98,11%
Program pengembangan sumber daya manusia	Pengembangan Kompetensi teknis		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	28 Orang	100%	105 orang	93,93%

					Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi majerial dan fungsional	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	I Laporan	100%	5 laporan	95,51%
--	--	--	--	--	---	--	--	-----------	------	-----------	--------

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SESUAI RENSTRA				REALISASI KINERJA					
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2025			
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI FISIK	CAPAIAN KINERJA	REALISASI FISIK	CAPAIAN KINERJA		
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	Meningkatkannya Kepercayaan Masyarakat terhadap Peringkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan/ kabupaten/ kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2: Dokumen	26,000,000	3 Dokumen	26,000,000	3 Dokumen	100%	15,302,600	3 Dokumen	96,43%	11.896,018
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2: Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	100%	1,997,600	1 Dokumen	91,92%	1.387,670
					Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2: Dokumen	5,500,000	2 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	100%	2,625,800	1 Dokumen	90,42%	1.348,235

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	RKA-SKPD	2	Dokumen	6,000,000	2	Dokumen	6,000,000	1	dokumen	100 %	2.128.500	1	dokumen	91,89 %	1.710.113
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	RKA-SKPD	2	Dokumen	5,500,000	2	Dokumen	6,000,000	2	dokumen	100 %	2.653.000	1	dokumen	88,57 %	1.348.279
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RKA-SKPD	2	Laporan	8,000,000	2	Laporan	8,000,000	2	Laporan	100%	2.762.200	3	Laporan	92,77 %	2.883.401











2	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Memingkatkan Kinerja Disiplin	Program Kepegawaian Daerah	Pemilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	46.300,00	46.300,00	3 Dokumen	46.300,00	100%	18.983.300	3 Dokumen	90,52 %	10.226.878
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	46.300,00	46.300,00	3 Dokumen	46.300,00	100%	18.983.300	3 Dokumen	90,52 %	10.226.878	
					Jumlah Lembara Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembara Profesi ASN yang Difasilitasi	46.220,00	46.220,00	1 Lembara	46.320,00	100 %	79.581.780	1 lembaga	98,63 %	34.220.000	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	46.000,00	47.000,00	4 Dokumen	47.000,00	100%	29.942.100	4 Dokumen	98,77 %	15.937.000	
					Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	26.250,00	26.250,00	1 Laporan	26.250,00	100 %	18.863.500	1 laporan	91,58 %	6.782.465	
					Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian	69.300,00	72.165,00	2 Dokumen	72.165,00	100%	34.536.100	1 Dokumen	99,11 %	26.895.082	





Program pengembangan sumber daya manusia	Pengembangan Kompetensi teknis	Penyelenggara pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	105 Orang	471,900,000	105 Orang	503,810,000	28 Orang	100%	252,423,000	105 orang	93,93 %	176.904.566
	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi majerial dan fungsional	Penyelenggara pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	1,207,696,000	5 Laporan	1,221,685,000	1 Laporan	100%	672,285,943	5 laporan	95,51 %	133.687.643

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai program Strategis berupa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan Pengembangan Aparatur.

Dalam hal tersebut diatas dapat di dapat d peroleh beberapa penyebab kegagalan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yakni

1. Perubahan Kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen
2. Peningkatan kompetensi SDM
3. Pesatnya layanan Digitalisasi
4. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait.

Dari Kendala yang dihadapi tersebut harus d berikan solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan
2. Sosialisasi kebijakan yang harus cepat tanggap sehingga SDM mampu beradaptasi dengan Perubahan kebijakan
3. Pelatihan penggunaan system digital bagi seluuh pegawai
4. Peningkatan Koordinasi dn Komunikasi

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 diraih beberapa hasil/prestasi, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum;
2. Berkembangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap serta etika birokrasi agar lebih profesional, demokratis dan bertanggungjawab;

3. Meningkatnya penguatan manajemen kepegawaian, pendidikan dan latihan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Aparat kepegawaian daerah turut berperan secara proaktif dalam rangka penguatan kualitas, kinerja dan pelayanan.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur bila ditinjau dari segi kuantitatif dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel. 3.5 Sumber Daya Aparatur BKPSDM T.A 2025**

NO	Tingkat Pendidikan	Tingkat Kepegawaian			Tingkat Jabatan		
		PNS	PPPK	PHL	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
	SMA	7	2	9			
	D1						
	DII			1			
	DIII	2		12			
	S1	22	3			2	3
	S2	9			1	2	
	<b>Golongan</b>						
	II	5					
	III.a	9					
	III.b	6					
	III.c	4					
	III.d	9					
	IV.a	7					
	IV.b						
	IV.c						
	<b>Golongan</b>						
	IX		3				
	V		2				

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur ditinjau dari segi kuantitatif dalam Tahun Anggaran 2025 sudah dianggap memadai. Selanjutnya, ditinjau dari segi penggolongan PNSD dapat di kualifikasikan sebagai berikut :

*Tabel. 3.6 Penggolongan ASN T.A 2025*

No.	Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
<b>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>						
1.	Pria	8	132	767	286	1193
2.	Wanita	0	82	1420	460	1962
<b>Jumlah</b>						<b>3155</b>
<b>Golongan Ruang</b>						
		V	VII	IX	X	
<b>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</b>						
1.	Pria	50	4	238	6	298
2.	Wanita	15	38	709	6	768
<b>Jumlah</b>						<b>1066</b>

Kemudian ditinjau dari penggolongan PNSD berdasarkan tingkat pendidikan, dikualifikasikan sebagai berikut :

*Tabel. 3.7 Penggolongan ASN dari Tingkat Pendidikan T.A 2025*

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.I	D.I I	D.III	D.IV / S.1	S.2	S.3	
<b>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>											
1.	Pria	3	7	200		13	58	778	132	2	1193
2.	Wanita			145	1		227	1407	180	2	1962
<b>Jumlah</b>											<b>3155</b>
<b>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</b>											

1.	Pria			50		4		238	6		298
2.	Wanita			15		38		709	6		768
											1066

Pengolahan data untuk tenaga PHL yang banyak membantu dalam kegiatan pelayanan pada instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, mulai 31 Desember 2025 di alih statuskan kepegawaiannya menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) dan ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan jumlah semua Pegawai PPPK PW sesuai Tabel berikut :

*Tabel. 3.8 Penggolongan ASN PPPK PW*

No	Jenis Kelamin	Pria	1447
		Wanita	3095
		Jumlah	4.542

Berdasarkan data-data tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Aparatur dengan tingkat pendidikan formal didominasi oleh ASN dengan Tingkat pendidikan Strata 1 (S1) ini menandakan bahwa ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar mampu untuk mengembang tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupoksi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.

Pengadaan, penyebaran, bimbingan kedisiplinan serta peningkatan kapasitas adalah merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan ukuran kinerja aparatur lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan roda organisasi.

Berikut di sajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

*Tabel. 3.9 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun Anggaran 202*

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (%)	JUMLAH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RATA-RATA KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (%)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Kepegawaian								
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.706.403.500,-	5.440.921.226,-	265.482.274,-	95,37%	3	100%	13	100%

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalokasikan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 6.994.503.000 Kemudian, terjadi perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Rp. 5.706.403.500

Sebagai bahan analisis akuntabilitas keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.10 Analisis Akuntabilitas Keuangan BKPSDM Tahun Anggaran 2025**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		Target (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keu (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,994.503.000	5.613.858.500	100%	5.349.480.327	95,29%
1.1	Perencanaan, Penganggaran	29.043.300	25.314.400	100%	23.756.113	93,875%

	<i>dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>					
1.1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.154.600	12.336.400	100%	11.896.018	96,43%
1.1.b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.502.200	1.509.700	100%	1.387.670	91,92%
1.1.c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.431.300	1.491.000	100%	1.348.235	90,42%
1.1.d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.652.700	1.861.100	100%	1.710.113	91,89%
1.1.e	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.420.000	1.522.300	100%	1.348.279	88,57%
1.1.f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.715.000	3.108.200	100%	2.883.401	92,77%
1.1.g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.167.100	3.485.700	100%	3.191.397	91,92%
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.150.502.750</i>	<i>3.917.755.750</i>	<i>100%</i>	<i>3.706.364.811</i>	<i>96,47%</i>
1.2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.053.303.000	3.833.124.000	100%	3.625.393.446	94,58%
1.2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.438.700	61.866.600	100%	60.171.701	97,26%

1.2.c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.415.500	13.414.800	100%	12.267.716	91,45%
1.2.d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.501.000	2.501.000	100%	2.305.090	92,16%
1.2.e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.844.500	6.869.550	100%	6.226.858	90,77%
1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>12.807.400</i>	<i>10.821.600</i>	<i>100%</i>	<i>10.332.329</i>	<i>95,48%</i>
1.3.a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.807.400	10.821.600	100%	10.332.329	95,48%
1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>25.737.700</i>	<i>6.420.100</i>	<i>100%</i>	<i>6.642.647</i>	<i>78,89%</i>
1.4.a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.737.700	8.420.100	100%	6.642.647	78,89%
1.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>394.501.900</i>	<i>385.372.000</i>	<i>100%</i>	<i>382.085.541</i>	<i>99,41%</i>
1.5.a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.633.000	6.238.400	100%	6.005.989	96,27%

1.5.b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.980.900	92.545.000	100%	91,440.899	99,93%
1.5.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	9.334.600	100%	8.219.404	88,05%
1.5.d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.660.000	2.380.000	100%	2.380.000	100%
1.5.e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.228.000	153.794.000	100%	153.783.740	99,99%
1.5.f	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	6.080.000	100%	5.340.600	87,84%
1.5.g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	115.000.000	115.000.000	100%	114.915.000	99,93%
1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>116.580.750</i>	<i>105.742.650</i>	<i>100%</i>	<i>100.082.912</i>	<i>97,74%</i>
1.7.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.008.400	13.660.300	100%	11.588.247	84,71%

1.7.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.342.350	78.353.450	100%	69.445.833	88,77%
1.7.c	Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.030.000	4.350.000	100%	4.325.000	99,99%
1.7.d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	9.360.000	100%	9.360.000	100%
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>101.220.000</i>	<i>130.690.000</i>	<i>100%</i>	<i>127.622.647</i>	<i>97,65%</i>
1.8.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>101.220.000</i>	95.540.000	100%	92,472,647	96,79%
1.8.b	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	35.150.000	100%	35.150.000	100%
2.	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>905.653.700</b>	<b>793.955.500</b>	<b>100%</b>	<b>778.687.849</b>	<b>98,08%</b>
2.1	<i>Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi</i>	<i>342.940.100</i>	<i>176.979.100</i>	<i>100%</i>	<i>171.428.629</i>	<i>96,86%</i>

	<i>Kepegawaian ASN</i>					
2.1.a	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	24.000.000	6.596.300	100%	6.378.391	96,70%
2.1.b	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	149.600.000	81.869.700	100%	79,290.000	96,85%
2.1.c	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	81.500.000	18.975.900	100%	18.592.035	97,98
2.1.d	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	23.340.000	11.298.100	100%	10.226.878	90,52%
2.1.e	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	23.300.000	34.696.800	100%	34.220.600	98,63%
2.1.f	Pengelolaan Data Kepegawaian	24.200.000	16.136.400	100%	15.937.360	98,77%
2.1.g	Evaluasi Data, Informasi, dan Sistem Informasi Kepegawaian	17.000.000	7.405.900	100%	6.782.465	91,58%
2.2	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>220.766.000</i>	<i>305.624.100</i>	<i>100%</i>	<i>297.745.669</i>	<i>97,42%</i>
2.2.a	Pengelolaan Mutasi ASN	78.888.500	29.396.400	100%	28.632.930	97,40%
2.2.b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	94.627.500	45.336.700	100%	43.494.987	95,94%

2.2.c	Pengelolaan Promosi ASN	47.250.000	230.891.000	100%	225.617.752	97,72%
2.3	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	275.000.000	279.758.000	100%	278.536.909	99,56%
2.3.a	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	230.000.000	234.758.000	100%	234.387.839	99,84%
2.3.b	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	45.000.000	45.000.000	100%	44.149.070	98,11%
2.4	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	67.147.700	31.594.300	100%	30.976.642	90,04%
2.4.a	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	45.944.500	27.137.100	100%	26.895.082	99,11%
2.4.b	Pembinaan Disiplin ASN	21.203.200	4.457.200	100%	4.081.560	91,57%
3.	<b><i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i></b>	<b>1.258.255.500</b>	<b>328.311.500</b>	<b>100%</b>	<b>310.592.209</b>	<b>94,60%</b>
3.1	<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	255.246.400	188.338.400	100%	176.904.566	93,93%
3.1.a	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kometensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan</i>	255.246.400	188.338.400	100%	176.904.566	93,93%

	<i>Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum</i>					
3.2.	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	<i>1.003.009.100</i>	<i>139.973.100</i>	<i>100%</i>	<i>133.687.643</i>	<i>95,84%</i>
3.2.a	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	<i>1.003.009.100</i>	<i>139.973.100</i>	<i>100%</i>	<i>133.687.643</i>	<i>95,84%</i>

#### **A. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**

##### **Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja serta tercapainya pemenuhan kelembagaan dan keuangan, dengan alokasi anggaran Rp.25.314.400,- dan terealisasi sebesar Rp.23.765.113 atau 93.87% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) **Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah** dengan output kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Anggaran RP.12.336.400,- dan Terealisasi sebesar Rp.11.896.018,- atau 96.43 % dari alokasi anggaran.
- b) **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan output kegiatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.485.700 dan terealisasi sebesar Rp.3.191.397,- atau 91.92% dari alokasi anggaran.
- c) **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD** dengan output kegiatan Tersedianya Dokumen RKA SKPD dengan Anggaran RP.1.509.700,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.387.670,- atau 91,92 % dari alokasi anggaran.
- d) **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD** dengan output kegiatan Tersedianya Dokumen RKA SKPD dengan Anggaran RP.1.491.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.348.235,- atau 90.42 % dari alokasi anggaran.
- e) **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD** dengan output kegiatan Tersedianya Dokumen DPA SKPD dengan Anggaran RP.1.861.100,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.710.113,- atau 91.89 % dari alokasi anggaran.
- f) **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD** dengan output kegiatan Tersedianya Dokumen DPA SKPD dengan

Anggaran Rp.1.522.300,- dan Terealisasi sebesar Rp.1.348.279,- atau 88,57 % dari alokasi anggaran.

- g) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kerja SKPD dengan** output kegiatan tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kerja SKPD dengan Anggaran Rp.3.108.200,- dan terealisasi sebesar 2.883.401,- atau 92.77 % dari alokasi anggaran.

#### **B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertujuan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan keuangan Bulanan yang memadai, dengan alokasi anggaran Rp.3.917.755.750,- dan terealisasi sebesar Rp.3.706.364.811,- atau 96.47% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berikut :

- a) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan Output kegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp.3.833.124.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.625.393.446,- atau 94.58% dari alokasi anggaran.
- b) **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** dengan Output kegiatan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran Rp.61.48.632.200,- dan terealisasi sebesar Rp.60.171.701,- atau 97.26 % dari alokasi anggaran.

- c) **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD** dengan Output kegiatan Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran Rp.13.414.600,- dan terealisasi sebesar Rp.12.267.716,- atau 91.45 % dari alokasi anggaran.
- d) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** dengan Output kegiatan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp.2.501.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.305.090,- atau 92.16 % dari alokasi anggaran.
- e) **Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran** dengan Output kegiatan Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan perbulan dengan alokasi anggaran Rp.6.869.550,- dan terealisasi sebesar Rp 6.226.858,- atau 90.77% dari alokasi anggaran.

### **C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD bertujuan untuk penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah dan data aset yang memadai, dengan alokasi anggaran Rp.10.821.600,- dan terealisasi sebesar Rp.10.332.329,- atau 95.48 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) **Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD** dengan output kegiatan Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 10.821.600,- dan terealisasi sebesar Rp 10.332.329,- atau 95.48 % dari alokasi anggaran.

#### **D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bertujuan untuk penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai, dengan alokasi anggaran Rp 6.420.100,- dan terealisasi sebesar Rp.6.642.647 atau 78.89 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan:

- a) **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** dengan output kegiatan terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 8.420.100,- dan terealisasi Rp. 6.642.647,- atau 78.89 % dari alokasi anggaran.

#### **E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah .**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyediaan peralatan dan Perlengkapan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai, dengan alokasi anggaran Rp.385.372.000,- dan terealisasi sebesar Rp.382.085.541,- atau 99.14 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor** dengan output kegiatan tersedianya Komponen Instalasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp.6.238.400,- dan terealisasi Rp.6.005.898,- atau 96,27 % dari alokasi anggaran.
- b) **Penyediaan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan output kegiatan tersedianya Penyediaan Belanja Peralatan dan

Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp.92.545.000,- dan terealisasi Rp.91.440.899,- atau 99.93 % dari alokasi anggaran.

c) **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan output kegiatan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp.9.334.600,- dan terealisasi Rp.8.219.404,- atau 88.05% dari alokasi anggaran.

d) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan** dengan output kegiatan tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan dengan alokasi anggaran Rp.2.380.000,- dan terealisasi Rp.2.380.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

e) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Dengan output kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp.153.794.000,- dan terealisasi Rp.153.783.740,- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

f) **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** dengan output kegiatan terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp.6.080.000,- dan terealisasi Rp.5.340.600,- atau 87.84 % dari alokasi anggaran.

g) **Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** dengan output kegiatan terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp.115.000.000,- dan terealisasi Rp.114.915.000,- atau 99.93% dari alokasi anggaran.

#### **F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan alokasi anggaran Rp.105.742.650,- dan terealisasi sebesar Rp.100.082.912,- atau 97.74 % dari alokasi anggaran, adapun rincian subkegiatan:

- a) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan output kegiatan terlaksananya Jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran Rp.13.660.300,- dan terealisasi Rp.11.588.247,- atau 84.71 % dari alokasi anggaran.
- b) **Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik** dengan output kegiatan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran Rp.78.353.450,- dan terealisasi Rp.69.554.833,- atau 88.77 % dari alokasi anggaran.
- c) **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan Output kegiatan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 4.350.000,- dan terealisasi Rp. 4.325.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- d) **Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor** dengan Output kegiatan terlaksananya Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor dengan alokasi anggaran 9.360.000,- dan terealisasi Rp 9.360.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran

#### **G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

**Pemerintah Daerah .**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertujuan untuk tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan alokasi anggaran Rp.130.690.000,- dan terealisasi sebesar Rp.127.622.647,- atau 97,65 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Subkegiatan:

- a) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perisinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan** dengan output kegiatan tersedianya Jasa Pemeliharaan, perisinan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran Rp.95.540.000,- dan terealisasi Rp.92.472.647,- atau 96.79 % dari alokasi anggaran.
- b) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan output kegiatan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan alokasi anggaran Rp.35.150.000,- dan terealisasi Rp. 35.150.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

#### **H. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**

Kepegawaian Daerah bertujuan untuk terlaksananya Pendataan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Daerah dengan alokasi anggaran Rp.176.979.100,- dan terealisasi sebesar Rp.171.428.629,- atau 96.86 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan:

- a) **Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN** dengan output kegiatan terlaksananya

penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan alokasi anggaran Rp.6.596.300,- dan terealisasi Rp.6.378.391,- atau 96.70 % dari alokasi anggaran.

- b) **Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK** dengan output kegiatan terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dengan alokasi anggaran Rp.81.869.700,- dan terealisasi Rp.79.290.900,- atau 96.85 % dari alokasi anggaran.
- c) **Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN** dengan output kegiatan terlaksananya Pengadaan ASN dengan alokasi anggaran Rp.18.975.900,- dan terealisasi Rp.18.592.035,- atau 97.98 % dari alokasi anggaran
- d) **Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian** dengan output kegiatan terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS dengan alokasi anggaran Rp.11.298.100,- dan terealisasi Rp.10.226.878,- atau 90.52% dari alokasi anggaran
- e) **Fasilitasi Lembaga Profesi ASN** dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan alokasi anggaran Rp.34.696.800,- dan terealisasi Rp.34.220.600,- atau 98.63 % dari alokasi anggaran
- f) **Pengelolaan Data Kepegawaian** dengan output kegiatan terlaksananya Pengelola Data Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp16.136.400,- dan terealisasi Rp.15.937.360,- atau 98.77 % dari alokasi anggaran.
- g) **Evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian** dengan output kegiatan terlaksananya Evaluasi data Informasi dan sistem

informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp7.405.900,- dan terealisasi Rp.6.782.465,- atau 91.58% dari alokasi anggaran.

#### **I. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN .**

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN bertujuan untuk terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN dengan alokasi anggaran Rp.305.624.100,- dan terealisasi sebesar Rp.297.745.669,- atau 97.42 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Subkegiatan:

- a) **Pengelolaan Mutasi ASN** dengan output kegiatan terlaksananya Mutasi ASN dengan alokasi anggaran Rp.29.396.400,- dan terealisasi Rp.28.632.930,- atau 97,40 % dari alokasi anggaran.
- b) **Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN** dengan output kegiatan terlaksananya Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN dengan alokasi anggaran Rp. 45.336.700,- dan terealisasi Rp.43.494.987,- atau 95.94 % dari alokasi anggaran.
- c) **Pengelolaan Promosi ASN** dengan output kegiatan terlaksananya Pengelolaan Promosi dengan alokasi anggaran Rp.230.891.000,- dan terealisasi Rp.225.617.752,- atau 97,72 % dari alokasi anggaran.

#### **J. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN .**

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN bertujuan untuk Pengembangan pelaksanaanya Mutasi dan Promosi ASN dengan alokasi anggaran Rp.279.758.000,- dan terealisasi sebesar Rp.278.536.709,- atau 99.56 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Subkegiatan:

- a) **Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN** dengan output kegiatan terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan alokasi anggaran Rp.234.758.000,- dan terealisasi Rp.234.387.839,- atau 99.84% dari alokasi anggaran
- b) **Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat jabatan Fungsional** dengan output kegiatan terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional dengan alokasi anggaran Rp.45.000.000,- dan terealisasi Rp.44.149.070,- atau 98.11 % dari alokasi anggaran.

**K. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur .**

Kegiatan penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur Kompetensi ASN bertujuan untuk Pengembangan Perlakannya Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan alokasi anggaran Rp.31.594.300,- dan terealisasi sebesar Rp.30.976.642,- atau 90.04 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan:

- a) **Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan tanda jasa Aparatur** dengan output kegiatan terlaksananya Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur dengan alokasi Rp 27.137.100,- dan terealisasi sebesar Rp.26.895.082,- atau 99.11% dari alokasi anggaran.
- b) **Pembinaan Disiplin ASN** dengan output kegiatan terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN dengan alokasi Rp 4.457.200,- dan terealisasi sebesar Rp.4.081.560,- atau 91.57 % dari alokasi anggaran.\

#### **L. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia .**

Kegiatan Pengembangan Kompetensi adalah kegiatan yang bertujuan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN dengan alokasi anggaran Rp.188.338.400,- dan terealisasi sebesar Rp.176.904.566,- atau 93.93 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan:

- a) **Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan Pemerintah** dengan output kegiatan terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Teknis umum,Inti,dan Pilihan Bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan Pemerintah dengan alokasi anggaran Rp.188.338.4000,- dan terealisasi Rp.176.904.566,- atau 93,93 % dari alokasi anggaran.

#### **M. Kegiatan sertifikat,kelembagaan,pengembangan kompetensi Manejerial dan fungsional**

- a) **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah ,Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan.** dengan output kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah ,Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan dengan alokasi

anggaran Rp.139.973.100,- dan terealisasi Rp.133.687.643,- atau  
95.84.% dari alokasi anggaran.